

BAB IV

Kepentingan Pemerintah Rusia di Wilayah Asia Tengah era Vladimir Putin dalam keanggotaannya di *The Commonwealth of Independent States*

Rusia dan Asia Tengah dalam dunia internasional memiliki sejarah panjang bahkan berabad-abad sebelum terbentuknya Uni Soviet. Pertama kali kontak terjadi antara Rusia dan Asia Tengah dapat ditarik jauh kebelakang ke abad 16 Masehi. Ekspansi melalui jalur darat dilakukan oleh Moskow ke wilayah Khatanes untuk membangun kontak perdagangan dan mengumpulkan informasi tentang sistem politik, situasi perekonomian dan hubungan antar etnis mereka. Wilayah yang pertama kali ditaklukan oleh Rusia di Asia Tengah adalah wilayah yang sekarang menjadi bagian barat laut dari Kazakhstan pada tahun 1730an. Sementara itu pada era Uni Soviet Asia Tengah merupakan bagian paling miskin dari seluruh wilayah Uni Soviet dan hanya memainkan peran sebagai pemasok bahan-bahan mentah, seperti kapas, sutra, gandum dan bahan-bahan sumber daya mineral lainnya, seperti minyak, gas alam, besi, uranium dan sulfur (Górecki, 2014). Asia Tengah setelah runtuhnya Uni Soviet dan memisahkan diri menjadi negara merdeka terbagi menjadi beberapa negara sebagai berikut:

Gambar 2.3 Peta Negara-negara Asia Tengah



Sumber : Asian.net

Negara-negara seperti Azerbaijan, Kazakhstan, Kirgistan, Tajikistan, Turkmenistan dan Uzbekistan pada awal kemerdekaan juga sepakat dengan 6 negara eks-Soviet lainnya untuk bergabung dalam kerangka kerja sama regional negara eks-Soviet *The Commonwealth of Independent States* (CIS). Negara-negara Asia Tengah ini setelah selama lebih dari seabad berada dalam rezim Uni Soviet belum sepenuhnya siap akan konsekuensi dari runtuhnya Uni Soviet. Profil sosiologis mereka dibentuk oleh kebijakan Uni Soviet dan situasi ekonominya merupakan fungsi lama dari rancangan perekonomian dari Uni Soviet. Elit-elit

politiknya juga tidak memiliki pengalaman dalam hubungan internasional, karena pada era sebelumnya semua hal terkait urusan internasional dikontrol oleh Uni Soviet. Negara-negara ini adalah aktor yang belum berpengalaman yang diekspos dari awal oleh kekuatan internasional, untuk itu dengan adanya CIS ini merupakan langkah awal bagi negara-negara eks-Soviet ini untuk menata ulang kondisi dalam negerinya (Kozłowski).

Bagi Rusia hubungan dengan negara-negara Asia Tengah bukanlah sesuatu hal yang baru. Setelah runtuhnya Uni Soviet dan terbagi ke dalam 16 negara merdeka, Rusia yang masih dalam posisi membangun kembali kekuatan mereka di dunia internasional dan pada masa awal 1990an ini Rusia sempat mengarahkan politik luar negerinya ke dunia Barat dan kepentingan di wilayah negara tetangga bisa dikatakan sangat minim. Negara Asia Tengah yang baru merdeka dianggap gangguan yang dapat membatasi Rusia dalam politik luar negerinya. Pola ini berubah pada pertengahan 1990an, secara perlahan Presiden Rusia saat itu Boris Yeltsin mengubah arah politik luar negerinya untuk lebih memperhatikan wilayah Asia Tengah (Boonstra).

Ketertarikan kekuatan besar dunia seperti Amerika Serikat dan Rusia ini terhadap wilayah Asia Tengah lebih disebabkan karena sumber daya alam dan bahan mentah yang ada di Asia Tengah serta adanya jalur transit transportasi dan masalah keamanan yang sering terjadi di wilayah ini. Sebagai konsekuensi dari inkonsistensi pada politik luar negeri Rusia di masa awal runtuhnya Uni Soviet dan upaya negara Asia Tengah itu sendiri untuk memperbaiki kondisi dalam negerinya, membuat posisi Rusia di wilayah Asia Tengah sempat melemah di era Presiden

Boris Yeltsin (Górecki, 2014). Meskipun demikian Rusia masih merupakan kekuatan paling dominan di wilayah Asia Tengah. Ada beberapa hal yang menjadikan Rusia masih dominan di wilayah ini, yang pertama negara-negara baru eks-Soviet ini secara ekonomi masih bergantung pada Rusia. Aset terbesar yang dimiliki Asia Tengah adalah sumber daya energinya dan ekspor sumber daya ini hanya mungkin dilakukan melalui jalur pipa yang dimiliki oleh Rusia. Yang kedua isu keamanan menjadi penting karena negara Asia Tengah eks-Soviet belum sepenuhnya siap untuk merdeka dan keamanan negaranya masih sangat bergantung dengan Rusia. Kedua isu krusial ini membuat Rusia masih menjadi kekuatan dominan di Asia Tengah meskipun tidak lagi mendapat kontrol penuh atas wilayah tersebut (Kozłowski).

Ketika Vladimir Putin menggantikan Boris Yeltsin sebagai presiden, Putin membawa gaya baru dalam politik luar negeri Rusia. Tahun pertama Putin menjadi presiden, Putin menyampaikan aspirasi untuk membawa tatanan yang konseptual dan organisasional pada karakteristik politik luar negeri Rusia. Pada tahun pertama ini juga Putin merancang dokumen doktrinal yang dikeluarkan oleh Putin untuk mendefinisikan kebijakan luar negeri dan kebijakan keamanan Rusia di masa depan. Dokumen tersebut terdiri dari : *the National Security Concept* (10 January 2000), *the Military Doctrine* (21 April 2000), dan *the Foreign Policy Concept* (28 June 2000). Khusus pada dokumen *the Foreign Policy Concept* hubungan Rusia dengan negara eks-Soviet dijelaskan sebagai prioritas utama, kerja sama di bidang ekonomi juga dijelaskan sebagai salah satu prioritas politik luar negeri Rusia (Kazantsev A. , 2008).

Rusia pada era Putin memang mulai menguatkan posisinya di negara-negara tetangga, meskipun tidak menjelaskan dan dituliskan secara khusus Asia Tengah merupakan prioritas namun Rusia juga tidak ingin mengambil resiko kehilangan wilayah ini. Rusia masih memiliki keuntungan secara geografis, ekonomi dan sosial budaya melalui peninggalannya di wilayah Asia Tengah pada era Soviet lalu. Aset-aset ini akan dibutuhkan untuk memastikan interdependensi antara Rusia dan negara eks-Soviet terutama Asia Tengah tetap kuat, terutama setelah Putin berkuasa karena aktor internasional lainnya akan lebih waspada terhadap pergerakan Rusia di Asia Tengah (Boonstra). Rusia di wilayah Asia Tengah era Vladimir Putin juga menemukan tantangan baru dari kompetitor yang juga menganggap Asia Tengah sebagai wilayah strategis seperti Turki, Iran, Pakistan dan India yang kadang-kadang negara-negara tersebut dapat menawarkan barang-barang atau jasa yang tidak disediakan oleh Rusia (RIAC, 2013).

Pada dasarnya kebijakan Rusia terhadap Asia Tengah selama era kepemimpinan Vladimir Putin (2000-2008) sebagian besar didorong oleh keinginan untuk mempertahankan dan memperkuat pengaruh Rusia dan mengenai isu keamanan. Kebijakan ini terus berubah dari waktu ke waktu, seperti pada 1999-2001, Rusia secara mandiri berusaha untuk mengintegrasikan Asia Tengah tanpa bantuan Amerika Serikat dan Uni Eropa untuk menjamin keamanannya. Pada 2001-2003, Rusia enggan untuk sepakat bekerja sama dengan dunia Barat untuk menjamin keamanannya. Dan pada 2004-2008 lagi-lagi Rusia memutuskan untuk berusaha mengimbangi Amerika Serikat dalam mengejar pengaruh di Asia Tengah dengan cara politik luar negeri yang lebih aktif dan lewat peningkatan kerja

sama dengan aktor non-Barat diluar wilayah Asia Tengah (Kazantsev A. A., 2008). Pada bab ini dijelaskan kepentingan apa saja yang menjadi tujuan utama Rusia di wilayah Asia Tengah dalam kerangka kerja sama *The Commonwealth of Independent States* (CIS).

A. Kepentingan Politik

Secara historis dalam bidang politik Rusia merupakan aktor krusial dalam dinamika politik yang terjadi di Asia Tengah. Mengenai kepentingan politiknya di Asia Tengah yang seringkali dikhawatirkan oleh Rusia dalam dinamika di Asia Tengah adalah instabilitas situasi dalam negeri negara di Asia Tengah dan interpretasi bahwasanya jalan yang diambil oleh Kirgistan dan Tajikistan yang pro Rusia adalah jalan yang mengarah kepada kegagalan atau *State Failure* (Laruelle, 2014).

Aspek yang paling mencolok dari kepentingan politik Rusia di Asia Tengah baik pada era Boris Yeltsin (1990-1999) maupun Vladimir Putin (2000-2008) adalah kecenderungan yang hampir pasti dan terus berlanjut untuk mendukung dan mengakomodasi pemimpin yang autokratik. Baik Yeltsin maupun Putin berusaha untuk tidak mempromosikan demokrasi liberal di wilayah CIS. Sebaliknya, pemerintah Rusia baik Yeltsin dan khususnya Putin tampak nyaman dalam berurusan dengan pemimpin authoritarian yang bersedia untuk mendukung kepentingan Rusia dan mensejajarkan kepentingan mereka dengan CIS.

Kecenderungan ini diperkuat dengan adanya serangkaian gejolak yang terjadi di negara anggota CIS dan sekitarnya, dimulai dari kejatuhan Slobodan

Milosevic di Serbia pada tahun 2000, Revolusi Bunga Mawar di Georgia pada November 2003, Revolusi Oranye di Ukraina akhir 2004, Revolusi Cedar pada bulan Februari-Maret 2005, Revolusi Tulip di Kirgistan Maret 2005, dan kerusuhan serta tindakan brutal dari Pemerintah Uzbekistan pada Mei 2005. Peristiwa yang datang dengan cepat dan berlanjut ini, utamanya Revolusi Oranye di Ukraina, memiliki dampak yang besar pada Vladimir Putin dan Sekutu terdekatnya. Rancangan untuk membentuk *Common Economic Space* yang akan menghubungkan Rusia, Ukraina, Kazakhstan dan Belarusia dalam isu ekonomi dan pada akhirnya pembentukan struktur politik dan keamanan sebenarnya sudah direncanakan sebelum Revolusi Oranye. Namun sederet kejadian itu memupuskan harapan pembentukan *Common Economic Space* tersebut, dan menimbulkan kemunduran yang memalukan bagi pemerintah Rusia yang pada saat itu mendukung kandidat presiden yang pro-Rusia dalam pemilihan umum di Ukraina tahun 2004, yaitu Viktor Yanukovych dan dukungan tersebut menjadi sia-sia ketika Viktor gagal dalam pemilu.

Putin dan beberapa pejabat senior Rusia mengklaim sederet gejolak yang terjadi dalam waktu yang berdekatan ini secara keseluruhan adalah upaya Dunia Barat yaitu poros Amerika Serikat untuk mengacaukan situasi. Terutama melalui penyediaan bantuan kepada kelompok lokal non-pemerintah dan aktivis *grass-root*. Rusia pada saat itu menggunakan istilah “Revolusi Bayaran” atau “Revolusi Waralaba” untuk menjelaskan sederet gejolak yang terjadi di negara anggota CIS dan beberapa negara tetangga lainnya (Kramer, 2008).

Titik awal masuknya Amerika Serikat di wilayah Asia Tengah ini adalah ketika peristiwa serangan teroris 11 September 2001. Semua pemimpin negara Asia Tengah bersama dengan Rusia dan China, memberikan dukungan secara verbal dalam usaha memerangi terorisme atau *War on Terrorism* yang dikomandoi oleh Amerika Serikat. Bahkan Kirgistan dan Uzbekistan mengambil tindakan lebih jauh dengan mengizinkan pembentukan basis militer Amerika Serikat di wilayahnya. Hal ini menyebabkan persepsi dunia internasional akan makna strategis dari Asia Tengah meningkat secara signifikan. Meskipun secara resmi mendukung tindakan Amerika Serikat dalam *War on Terrorism*, Rusia juga berusaha untuk menegaskan kembali pengaruhnya di Asia Tengah kepada dunia internasional (Pomfret, 2003).

Momen kerja sama Rusia dan Amerika Serikat ini dalam kerangka *War on Terrorism* sempat mempertemukan keduanya pada forum *US-Russia Summit* Mei 2002 di Moskow, Rusia. Perjanjian untuk mengurangi sepertiga dari senjata nuklir masing-masing negara terbentuk dalam agenda *Strategic Offensive Reductions Treaty*. Namun hal ini tidak berlangsung lama karena konfrontasi kedua negara kembali pecah setelah Amerika Serikat memutuskan untuk mengundurkan diri dari *Anti-Missile Treaty* 1972 yang dianggap Rusia sebagai tindakan yang melanggar kesepakatan yang telah dibentuk sebelumnya oleh kedua negara.

Rentetan kejadian tersebut mulai dari gejolak yang terjadi di Asia Tengah dan masuknya Amerika Serikat ke wilayah Kirgistan dan Uzbekistan mengubah pandangan Rusia dalam pendekatan ke wilayah Asia Tengah. Rusia memutuskan dengan menjaga kepentingannya di Asia Tengah dan memelihara stabilitas serta keamanan juga berarti secara tidak langsung meningkatkan pengaruh Rusia dan

mengurangi pengaruh Amerika Serikat. Untuk mengurangi dan mengimbangi pengaruh Amerika Serikat ini Rusia juga membantu meningkatkan pengaruh dan partisipasi China atau bahkan Iran di wilayah Asia Tengah. *Color Revolution* yang terjadi di beberapa negara membawa dampak tersendiri bagi negara di Asia Tengah, seperti di Kirgistan pada Maret 2005 presiden Askar Akaev, yang dikenal sebagai pemimpin yang paling pro-Barat dan liberal digulingkan dalam gejolak yang disebut Revolusi Tulip. Pemerintahan yang menggantikan setelahnya tidak seliberal Akaev dan lebih pro-Rusia dibanding sebelumnya (Kazantsev A. A., 2008).

Sementara itu di Uzbekistan masih pada tahun yang sama Juni 2005, pada saat itu pemerintah Uzbekistan dikritik oleh Uni Eropa dan Amerika Serikat atas tindakan pemerintah Uzbekistan yang mengeksekusi ratusan demonstran di kota Andijan. Pada saat yang sama Vladimir Putin menjamu presiden Uzbekistan Islam Karimov dalam pertemuan sekaligus makan malam mewah di Moskow dan Novo-Ogarevo. Dalam pernyataan pembuka pada pertemuan tersebut, Putin menawarkan Karimov sambutan yang hangat dan mengatakan dia sangat senang bahwa sangat memungkinkan bagi Uzbekistan untuk meredakan situasi dalam negerinya. Putin memuji presiden Uzbekistan tersebut karena berhasil mengembalikan situasi normal di dalam negeri Uzbekistan. Karimov sendiri mengenai permasalahan di dalam negerinya yang dikritik oleh Uni Eropa dan Amerika Serikat mengklaim bahwa kekerasan yang terjadi di Andijan semata-mata ditujukan untuk ekstrimis, pasukan keagamaan radikal serta pihak-pihak yang dibayar dan ditugaskan oleh aktor luar negeri yang merencanakan aksi tersebut dengan sangat baik. Putin secara

implisit mendukung pernyataan Karimov tersebut dan mengatakan bahwa Rusia memiliki informasi tentang infiltrasi pejuang terlatih ke Uzbekistan dari basis-basis yang ada di Afghanistan (Kramer, 2008).

Pada bulan-bulan berikutnya Rusia terus melanjutkan hubungan baiknya dengan rezim Karimov, dan pada saat yang sama hubungan Uzbekistan dan dunia Barat memburuk. Karimov membalas kritik yang dilakukan Uni Eropa dan Amerika Serikat dengan memerintahkan pembubaran basis militer di negaranya dan menuntut pencabutan perwakilan dari dunia Barat dan NGO di Uzbekistan, dan meminta Rusia untuk mengisi kekosongan tersebut. Pada September 2005, pasukan militer Rusia melakukan latihan militer di sekitar daerah Tashkent sebagai simulasi untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menumpas pemberontakan Islamis. Akhir 2005 kedua negara menandatangani perjanjian untuk berkomitmen untuk saling membantu jika ada ancaman datang bagi kedua negara. Perjanjian ini juga menyebutkan bahwa Rusia dapat menggunakan fasilitas militer Uzbekistan untuk dapat menangkal ancaman baik bagi rezim Karimov maupun Rusia itu sendiri (Kramer, 2008).

Sementara itu kesuksesan menjalin hubungan baik dengan Uzbekistan ini terus didengungkan oleh Putin kepada negara Asia Tengah lainnya. Secara berulang-ulang pemerintah Rusia menekankan betapa pentingnya tindakan yang diambil oleh Karimov di Uzbekistan dalam menangkal ancaman yang datang dari dunia Barat. Pemerintahan Rusia mendesak negara Asia Tengah lainnya sama halnya dengan Uzbekistan agar menghapus program asistensi-demokrasi dari dunia Barat, mengatakan bahwa program tersebut hanyalah pengalihan dan espionase

dalam bentuk lain. Secara keseluruhan sebenarnya Rusia berhasil mewujudkan tujuan utamanya di wilayah ini yaitu untuk mengimbangi dan menangkal pengaruh dunia Barat dan mencegah pembentukan organisasi independent yang pro-Barat.

Tendensi politik Rusia di Asia Tengah secara umum di dorong oleh masuknya aktor-aktor baru di Asia Tengah, terutama sejak Vladimir Putin secara lantang menyuarakan bahwa *Near Abroad Policy* merupakan prioritas utamanya yang tertulis dalam *the Foreign Policy Concept* yang dikeluarkan pada 28 Juni 2000. Gerak cepat ini menimbulkan kewaspadaan dari rival utama Rusia dari poros Amerika Serikat, dan anggapan intervensi Amerika Serikat sudah mulai memasuki wilayah negara anggota CIS setelah deretan gejolak tersebut semakin mendorong Rusia untuk lebih cepat dalam mengembalikan dan memperkuat pengaruhnya terutama di wilayah Asia Tengah.

B. Kepentingan Keamanan

Seperti yang ditulis sebelumnya bahwasanya segera setelah dilantik menjadi presiden Rusia Vladimir Putin langsung bergerak cepat dengan mengeluarkan tiga dokumen yang menjadi pedoman tentang sikap dan arah kebijakan dalam dan luar negeri dari Rusia. Ketiga dokumen tersebut berupa *the National Security Concept* yang dirilis pada 10 Januari 2000, *the Military Doctrine* pada 21 April 2000, dan *the Foreign Policy Concept* pada 28 Juni 2000, dapat dilihat dari ketiga dokumen tersebut dua diantaranya merupakan dokumen yang secara khusus membahas tentang keamanan. Hal ini menunjukkan salah satu fokus utama dari kebijakan dalam dan luar negeri Rusia adalah isu mengenai keamanan. Dalam dokumen *the*

Foreign Policy Concept Rusia juga menekankan isu keamanan di wilayah negara anggota CIS merupakan fokus utamanya. Adapun dalam *the National Security Concept* beberapa hal menjadi fokus utama, *National Security Concept* ini dibagi kedalam empat poin berbeda, poin pertama membahas tentang sikap Rusia dalam menghadapi ancaman dari dunia internasional atau dalam menghadapi isu-isu yang dianggap dapat mengancam keamanan serta kestabilan negara Rusia. Dalam poin pertama ini juga Rusia berusaha menunjukkan komitmen dan keinginannya dalam menyelesaikan masalah keamanan internasional. Poin kedua pada *National Security Concept* membahas tentang kepentingan Rusia dalam hal isu keamanan baik pada ranah nasional, regional maupun internasional. Adapun kepentingan-kepentingan ini menyangkut pertahanan kedaulatan, pencegahan agresi militer terhadap Rusia dan aliansinya, memperkuat posisi sebagai negara besar dan salah satu negara dengan pengaruh terbesar di dunia yang multipolar. Dalam poin ini juga ditekankan bahwa Rusia secara khusus akan membangun hubungan yang lebih baik lagi dengan negara anggota CIS dan negara yang dikategorikan sebagai *traditional partners* Rusia dalam dunia internasional.

Poin ketiga dalam dokumen ini membahas tentang hal-hal yang dianggap sebagai ancaman bagi keamanan nasional Rusia. Beberapa yang menjadi isu yang dianggap mengancam bagi Rusia adalah potensi untuk melemahkan pengaruh Rusia dalam bidang politik, ekonomi dan militer di dunia internasional, ekspansi NATO dan blok-blok militer lainnya kewilayah Timur atau negara tetangga Rusia, potensi pengembangan senjata pemusnah masal oleh negara-negara lain. Dan pada poin ini juga disebutkan salah satu ancaman keamanan bagi Rusia adalah konflik perbatasan

baik di Rusia maupun negara anggota CIS. Poin terakhir dalam dokumen ini membahas tentang bagaimana kebijakan Rusia seharusnya dirumuskan untuk memastikan keamanan nasional bagi Rusia, dalam poin ini Rusia menekankan bahwa pengendalian terhadap senjata pemusnah masal dan barang-barang militer lainnya menjadi fokus utama agar tercipta keamanan baik bagi Rusia maupun dunia internasional (Putin, 2000).

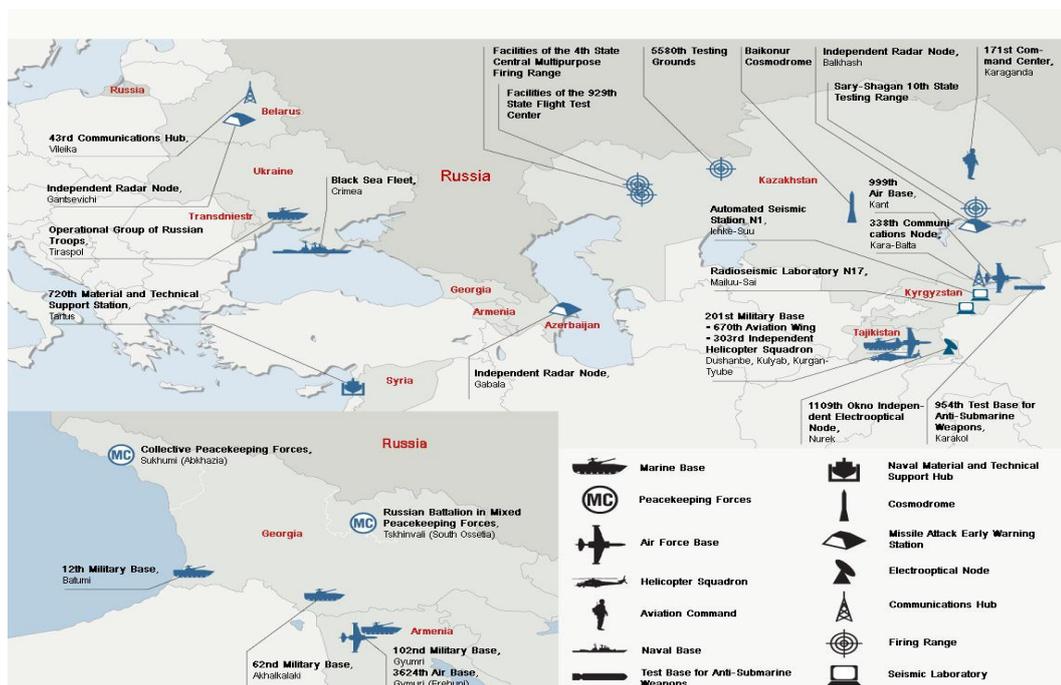
Secara keseluruhan dalam konsep keamanan nasional tersebut beberapa hal menjadi fokus utama Rusia dalam hal keamanan negaranya, seperti pengendalian dari senjata nuklir atau senjata pemusnah masal yang dimiliki beberapa negara di dunia. Sementara itu secara khusus beberapa kali dalam dokumen tersebut disebutkan bahwa *The Commonwealth of Independent State* dan Asia Tengah adalah prioritas dalam bidang keamanan, seperti pada poin ke empat pada paragraf terakhir jelas dituliskan bahwa CIS merupakan komponen vital bagi Rusia dalam memastikan keamanan nasional negaranya.

Posisi Asia Tengah menjadi penting dalam bidang keamanan karena negara-negara seperti Kazakhstan, Kirgistan, Tajikistan, Turkmenistan dan Uzbekistan memainkan peranan penting pada era Uni Soviet dalam hal pengembangan senjata pemusnah masal. Negara-negara tersebut memiliki sumber daya uranium dan bahan bakar fosil berlimpah yang dapat digunakan untuk pengembangan senjata pemusnah masal. Dengan kondisi negara-negara tersebut menjadi negara merdeka pasca runtuhnya Uni Soviet, Asia Tengah menghadapi tantangan untuk mengelola senjata pemusnah masal yang ditinggalkan oleh kompleks industri militer Uni Soviet (Butler, 2002). Untuk itu penting bagi Rusia memastikan bahwa senjata pemusnah

masal peninggalan Uni Soviet ini tidak menjadi ancaman bagi Rusia di masa yang akan datang.

Kepentingan Rusia di wilayah Asia Tengah ini dalam hal keamanan dapat dilihat pada basis-basis dan pasukan militer yang tersebar di seluruh wilayah Asia Tengah, basis-basis tersebut terdiri dari markas angkatan laut, angkatan udara, angkatan darat dan beberapa basis-basis lainnya. Secara lengkap dapat dilihat pada infografis di bawah ini persebaran kekuatan militer Rusia di Asia Tengah:

Gambar 2.4 Peta Persebaran Basis-basis Militer Rusia di Asia Tengah dan Negara Anggota CIS



Sumber : <http://mapsontheweb.zoom-maps.com>

Kekuatan militer yang tersebar di Asia Tengah ini menunjukkan Rusia sebagai kekuatan besar ingin memastikan bahwa tidak ada ancaman keamanan yang dapat datang dari negara-negara eks-Soviet atau anggota CIS pada umumnya dan negara di Asia Tengah pada khususnya.

Selain hal tersebut ada tiga faktor utama yang menjadi kekhawatiran terbesar Rusia dalam hal keamanan di Asia Tengah, yang pertama adalah Rusia merupakan konsumen terbesar opium dan heroin dari Afghanistan yang diikuti oleh Iran. Opium dan heroin ini masuk ke Rusia melalui jalur terselubung di negara Asia Tengah, oleh karena itu mengenai hal tersebut seringkali Rusia mengirimkan protesnya terhadap negara Asia Tengah karena kurangnya keinginan untuk memberantas perdagangan narkoba dan peran politisi lokal yang korup dalam mendukung dan menutupi perdangan narkoba. Yang kedua adalah potensi pergerakan kelompok islam ekstrimis di Asia Tengah. Ketakutan Rusia adalah bahwasanya kelompok-kelompok tersebut akan mulai menyebarkan pengaruh dan aksinya ke Rusia melalui perbatasan negara Asia Tengah dan memicu kembali adanya serangan teroris yang terjadi di wilayah ini. Yang ketiga adalah kekhawatiran Rusia akan potensi konflik antar negara yang terjadi di Asia Tengah, isu ini seringkali meliputi pengelolaan air, konflik antar etnis dan sengketa perbatasan yang belum selesai (Laruelle, 2014).

Berkaitan dengan kelompok ekstrimis kekhawatiran akan hal ini semakin menguat karena munculnya gerakan radikal islam Taliban yang muncul pertama kali diantara penguasi Afghanistan di Pakistan pada tahun 1994. Taliban dalam enam tahun pasca pertama kali muncul berhasil menduduki sebagian besar wilayah Afghanistan bahkan sampai 90% pada tahun 1998, hal ini menjadikan Asia Tengah menjadi wilayah paling depan yang berhadapan langsung dengan gerakan ekstrimis ini. Kesuksesan Taliban menduduki sebagian besar wilayah Afghanistan dan dukungannya terhadap gerakan islam radikal lainnya seperti Al-Qaeda

mempengaruhi gerakan-gerakan ekstrimis lainnya di Asia Tengah yang menjadi lebih aktif dan agresif. Gerakan islam radikal seperti *The Islamic Movement of Uzbekistan* (IMU) yang diketuai Tahir Yuldashev dan Juma Namangani menjadi gerakan islam radikal yang paling kuat di Asia Tengah. Serangkaian serangan teroris terjadi di penjuru Asia Tengah seperti invasi yang dilakukan IMU terhadap wilayah Kirgistan, Tajikistan dan Uzbekistan pada tahun 2000, dan pada saat yang sama Rusia juga mengalami beberapa serangan teroris di Moskow. Hal tersebut menjadi peringatan bagi Asia Tengah dan Rusia bahwa negara dengan struktur pemerintahan yang lemah dan memiliki populasi yang besar dapat terancam bahkan hanya dengan kelompok atau gerakan ekstrimis yang relatif kecil, dan hal ini dapat membawa potensi menyebarnya gerakan tersebut ke wilayah yang lebih luas lagi (Kazantsev A. A., 2008).

Sementara dalam kerangka kerja sama regional CIS, dalam menanggapi ancaman yang datang dari kelompok ekstrimis ini Rusia berusaha meningkatkan kerja samanya dengan negara anggota CIS khususnya dengan negara Asia Tengah. Sebenarnya dalam bidang keamanan basis utama dari kerja sama keamanan telah terbentuk sejak tahun 1992 dalam *Collective Security Treaty* yang ditandatangani oleh Armenia, Kazakhstan, Kirgistan, Rusia, Tajikistan, Uzbekistan dan diikuti pada tahun 1993 oleh Azerbaijan, Belarusia dan Georgia. Namun perjanjian ini seperti halnya dengan perjanjian lainnya di masa awal pembentukan CIS hanyalah menjadi wacana di atas kertas. Oleh karena itu berdasarkan basis yang telah ada Rusia berusaha kembali menguatkan kerja sama dalam bidang keamanan dengan Asia Tengah dan negara anggota CIS lainnya. Seperti pada tahun 2002 pasca

serangan teroris terhadap Amerika Serikat oleh Taliban, Rusia bersama dengan Armenia, Belarusia, Kazakhshtan, Kirgistan dan Tajikistan menandatangani piagam *The Collective Security Treaty Organization* (CSTO) dan kesepakatan tentang legalitas status dari CSTO. Dalam kerangka ini Rusia menawarkan kepada rekan anggotanya pelatihan militer dan persenjataan di Rusia dengan harga yang disubsidi, dan sebagai tambahan 4000 anggota *Collective Rapid Response Force* dibentuk khusus untuk Asia Tengah (Kazantsev A. A., 2008).

Rusia juga menawarkan kerja sama bidang keamanan kepada negara-negara Asia Tengah lainnya, sebagian multilateral seperti CSTO dan sebagian bilateral antar negara. Semua negara Asia Tengah dapat membentuk sendiri persyaratan apa saja yang cocok pada negaranya terhadap bantuan militer dari Rusia. Seperti pada gambar infografis persebaran kekuatan militer Rusia yang telah dipaparkan sebelumnya, Rusia memiliki basis militer di dua negara Asia Tengah yaitu Kirgistan dan Tajikistan. Rusia juga memiliki beberapa situs militer dan tempat latihan tembak di Kazakhstan. Rusia memang masih menjadi penyedia utama dalam hal pelatihan militer bagi negara-negara di Asia Tengah (Laruelle, 2014).

Kepentingan keamanan Rusia di Asia Tengah era awal Vladimir Putin ini dominan karena adanya potensi ancaman keamanan yang datang dari gerakan-gerakan ekstrimis, kerangka kerja sama seperti CSTO merupakan contoh bahwa Rusia berusaha dengan cepat mengantisipasi ancaman ini. Negara-negara seperti Tajikistan, Turkmenistan dan Uzbekistan yang berbatasan langsung dengan Afghanistan dan Iran merupakan garda terdepan untuk menangkal ancaman yang datang dari kelompok ekstrimis. Dengan menempatkan basis-basis militernya di

penjuru Asia Tengah Rusia juga menunjukkan bahwa keamanan wilayah Asia Tengah penting karena dengan memastikan stabilitas dan keamanan juga bersamaan dengan itu mengurangi potensi ancaman yang dapat datang dari negara-negara Asia Tengah.

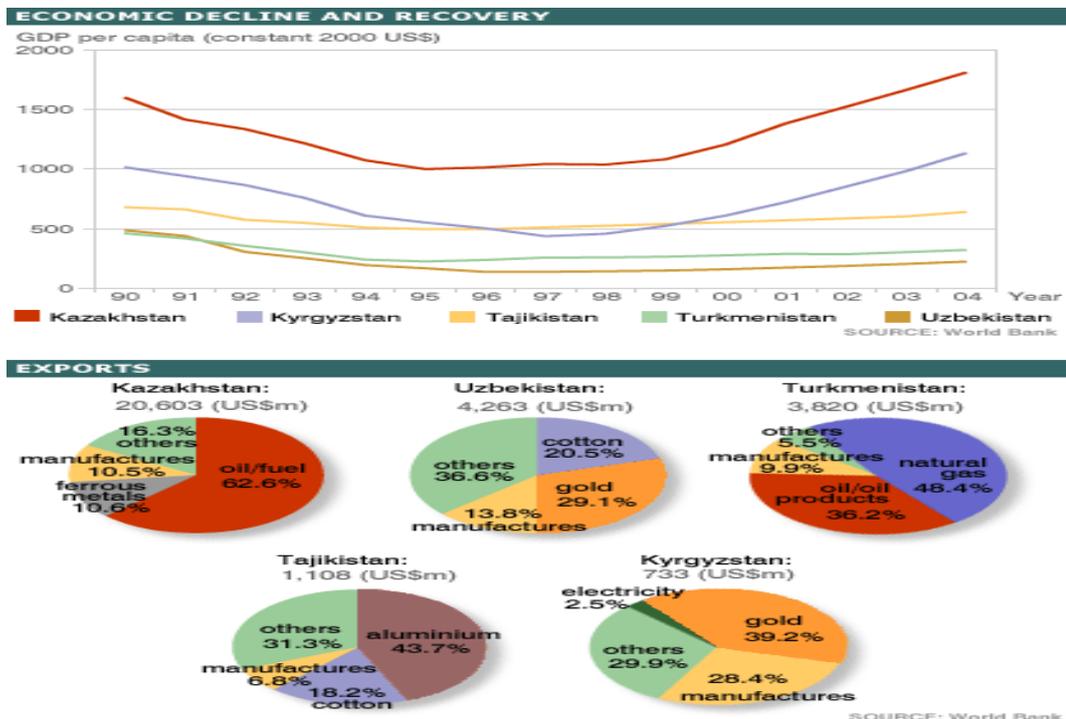
C. Kepentingan Ekonomi

Awal tahun 1990an pasca runtuhnya Uni Soviet, negara Asia Tengah yang merdeka dan lepas dari Uni Soviet menjadi beban ekonomi bagi Rusia yang bisa dikatakan negara eks-Soviet yang paling besar dari segi pengaruh dan kondisi perekonomiannya. Hal ini menyebabkan dalam tahun-tahun pertama runtuhnya Uni Soviet Rusia harus memberikan subsidi ekonomi kepada negara-negara anggota CIS (Kramer, 2008). Hal tersebut tentu saja menjadikan Rusia aktor dominan dalam bidang ekonomi di wilayah ini. Negara-negara anggota CIS pada awal 1990 sebagai negara yang baru merdeka memang memiliki potensi yang cukup menjanjikan dalam dunia Internasional, potensi ini berupa potensi sumber daya minyak dan gas serta potensi pasar yang besar bagi produk-produk dari negara-negara besar.

Setelah runtuhnya Uni Soviet dan terbentuknya *framework* baru bagi negara-negara eks-Soviet dalam *The Commonwealth of Independent States*, hal ini menjadi wadah dan awal yang baru bagi negara-negara yang bisa disebut sebagai *newly independent state* ini, hal ini memberikan kesempatan bagi negara-negara tersebut untuk berintegrasi dalam berbagai bidang terutama dalam hal ekonomi yang menjadi salah satu pondasi penting bagi negara-negara yang baru merdeka. Terbentuknya CIS ini juga menjadi penting untuk meredam situasi politik yang

memanas pasca runtuhnya Uni Soviet dan diikuti oleh konflik etnis yang terjadi di berbagai negara eks-Soviet. Negara-negara yang terbagi kedalam 16 negara merdeka ini tentunya memiliki potensi masing-masing baik dari segi populasi sebagai pasar perkonomian, sumber daya alam, dan sebagainya. Dalam penjelasan berikut dipaparkan CIS sebagai bentuk kerja sama regional negara Eks-Soviet memiliki potensi untuk berkembang yang cukup besar dilihat dari data-data yang dipaparkan sebagai berikut:

Gambar 2.5 Infografis Perkembangan Ekonomi di Asia Tengah dan Sumber Daya Alam Masing-masing Negara



Sumber : news.bbc.co.uk

Dapat dilihat pada data di atas pertumbuhan *Gross Domestic Product* per kapita negara anggota CIS di Asia Tengah terus tumbuh pada era Presiden Vladimir

Putin, *trend* pertumbuhan positif ini tentunya memiliki dampak tersendiri bagi negara anggota CIS, selain baik bagi perkembangan negaranya juga memiliki dampak untuk menarik minat investor asing di negara-negara anggota CIS khususnya Asia Tengah. Pertumbuhan yang signifikan memang terjadi pada dua negara yaitu Kazakhstan dan Kirgistan hal ini dipengaruhi faktor kedua negara sebagai negara dengan sumber daya mineral terbesar di Asia Tengah.

Selain pada segi GDP per kapita, potensi Asia Tengah juga terdapat pada sektor lain seperti sumber daya mineral dan gas serta sumber daya alam lainnya. Negara-negara Asia Tengah ini memiliki sektor terkuatnya masing-masing dalam hal sumber daya alam, seperti Kazakhstan yang memiliki sumber daya minyak dan gas terbesar di wilayah Asia Tengah, Uzbekistan yang memiliki kekayaan sumber daya alam berupa emas dan kapas, Turkmenistan dengan sumber daya minyak dan gas alamnya, Tajikistan pada sumber daya alam berupa aluminium dan kapas, dan Kirgistan dengan kekayaan sumber daya alam berupa emas.

Meskipun memiliki potensi yang cukup besar di berbagai bidang, pada akhir 1990an Rusia belum menunjukkan aktivitas yang berarti terhadap perkembangan kerja sama ekonomi dengan negara di Asia Tengah. Bukti paling jelas adalah pada empat tahun terakhir era Presiden Boris Yeltsin volume perdagangan antara Rusia dan Asia Tengah berkurang bahkan di bawah level sebelumnya pada lima tahun pertama Presiden Boris Yeltsin menjabat. Pada periode 1996-1999 omset perdagangan berkurang hampir 50%, dari 7,2 Miliar Dollar ke 3,7 Miliar Dollar. Dapat dilihat secara lengkap pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2 Perdagangan antara Rusia dan Asia Tengah, 1996-1999

Year	Trade turnover, millions of US dollars	Russia's exports to Central Asia, millions of US dollars	Russia's imports from Central Asia, millions of US dollars	Russia's trade balance, millions of US dollars
1996	7244	3920	3324	596
1997	6833	3402	3431	-29
1998	5411	3165	2246	919
1999	3695	1903	1792	111

Sumber : Jurnal *The Evolution of Russia's Central Asia Policy*, hal 9

Jadi bukanlah sesuatu yang berlebihan untuk disimpulkan bahwa dari tahun 1996-1999 hubungan kerja sama ekonomi antara Rusia dan Asia Tengah mengalami degradasi yang cukup signifikan. Namun diakhir masa jabatan Boris Yeltsin ini ada tanda-tanda terbentuknya kerja sama dengan Kazakhstan pada sektor minyak dan gas. Terpilihnya Vladimir Putin sebagai suksesor Boris Yeltsin pada tahun 2000 menjadi titik tolak bagi Rusia untuk lebih fokus menjadikan Rusia salah satu kekuatan ekonomi terbesar lagi (Vladimir Paramonov & Aleksey Stokov, 2008).

Dibandingkan dengan tahun 1990an, aktivitas politik luar negeri Rusia di Asia Tengah sejak kekuasaan beralih ke Vladimir Putin jauh lebih kuat. Deklarasi tentang komitmen membentuk kerja sama yang lebih dekat dan kuat lagi mulai banyak dilakukan oleh pemimpin negara Asia Tengah. Rusia menjadi aktor yang paling dominan menyuarakan kerja sama ini, Rusia era Vladimir Putin berniat untuk menghidupkan kembali kerja sama khususnya di bidang ekonomi dalam kerangka CIS yang telah terbentuk sejak lama. Kebijakan luar negeri Rusia terbukti sangat fleksibel, secara bersamaan Rusia mendorong beberapa integrasi ekonomi di

wilayah CIS dan khususnya Asia Tengah. Yang pertama adalah *The Eurasian Economic Community*, integrasi ini terbukti merupakan yang paling efektif. Kesepakatan formasi *The Eurasian Economic Community* ditandatangani di Astana, Kazakhstan pada tahun 2000 oleh Rusia, Belarusia, Kazakhstan, Kirgistan dan Tajikistan. Formasi dari *The Eurasian Economic Community* (EurAsEC) memberikan dorongan terhadap ekspansi aktivitas kerja sama ekonomi antara negara anggota dalam EurAsEC. Yang kedua adalah *The Unified Economic Space*, berbeda dengan EurAsEC integrasi ekonomi ini bisa dikatakan hampir tidak berfungsi sama sekali. Perjanjian *The Unified Economic Space* ditandatangani di Yalta, Ukraina pada tahun 2003 oleh Rusia, Belarusia, Kazakhstan dan Ukraina. Integrasi ini hampir tidak berfungsi disebabkan sejak Revolusi Oranye yang terjadi di Ukraina pada tahun 2004 instabilitas politik terjadi dan menyebabkan integrasi ekonomi ini sulit untuk berkembang. Yang ketiga *The Central Asian Cooperation Organization*, integrasi ini muncul bersama dengan EurAsEC pada tahun 2002. *The Central Asian Cooperation Organization* (CACO) dibentuk berdasarkan kerangka *Central Asian Economic Community* yang sudah sejak 1998 telah terbentuk. CACO sendiri beranggotakan Russia, Kazakhstan, Kirgistan, Tajikistan dan Uzbekistan (Vladimir Paramonov & Aleksey Stokov, 2008).

Selain memperkuat hubungan dari segi integrasi ekonomi Rusia era Vladimir Putin juga memiliki salah satu komponen terpenting yaitu jaringan pipa yang dapat dimanfaatkan dalam hal penyediaan dan pengiriman minyak dan gas di Asia Tengah. Rusia memiliki monopoli terhadap ekspor minyak dan gas yang harus dialirkan melalui Rusia dan Rusia sendiri memiliki jaringan pipa tersebut. Jaringan

pipa tersebut dibangun oleh *Caspian Pipeline Consortium* pada tahun 1999 yang menghabiskan dana 2,6 Miliar Dollar, untuk mengalirkan minyak dari ladang minyak Kazakhstan di Tengiz ke Novorossiisk, dan pertama kali minyak mengalir melalui jaringan pipa ini adalah pada Oktober 2001. Kapasitas awal pipa ini adalah 28,2 juta ton per tahun atau 560.000 barel per hari tapi kapasitas akhirnya diperkirakan mencapai 67 juta ton per tahun. Ini merupakan langkah awal bagi rencana ambisius Kazakhstan untuk mengirim 3 juta barel perhari dalam 15 tahun kedepan dan menjadi salah satu negara eksportir minyak terbesar di dunia. Rusia juga memiliki jaringan pipa lainnya yang terbentang dari Baku, Azerbaijan ke Novorossiisk. Namun jaringan pipa ini diperkirakan sulit digunakan karena melalui daerah Chechnya yang sedang mengalami konflik dengan Rusia di masa itu. Rusia sendiri telah mengganti rute pipa yang melalui Chechnya ke Dagestan dan aliran minyak pertama sampai ke Novorossiisk pada November 2001 (McCauley, 2002).

Negara-negara seperti Azerbaijan, Kazakhstan dan Turkmenistan sebenarnya memiliki garis kebijakan yang sama didorong oleh estimasi mereka bahwa dasar laut Caspia yang lebih dekat dengan garis pantai negara-negara tersebut memiliki kandungan minyak dan gas lebih banyak dibandingkan dengan Rusia maupun Iran. Selain itu bagi negara-negara tersebut pengembangan sumber daya hidrokarbon dianggap komponen esensial untuk menunjang kekayaan negaranya, dan mempertahankan kemerdekaan politiknya. Kesempatan ekspolarasi sumber daya minyak dan gas ini menarik banyak perhatian investor internasional seperti Kazakhstan yang menarik 40 miliar dollar investasi luar negeri pada tahun

2003, dan hal ini memberikan negara-negara tersebut kepercayaan diri lebih pada persaingan eksplorasi sumber daya minyak dan gas dengan Rusia (Johnson, 2007).

Selanjutnya berkaitan dengan kepentingan ekonomi hal utama yang Rusia fokuskan dalam bidang ekonomi tentu saja pada sektor minyak dan gas dimana investasi Rusia sangat besar pada sektor tersebut. Aktivitas perekonomian Rusia di Asia Tengah lebih banyak di negara-negara yang memiliki cadangan sumber daya hidrokarbon yang besar seperti Kazakhstan, Turkmenistan dan Uzbekistan. Perusahaan minyak Rusia, Gazprom juga meningkatkan aktivitasnya dalam pengembangan pasar untuk produk sumber daya minyak dan gas khususnya di Kirgistan dan Tajikistan. Pengembangan kerja sama di sektor minyak dan gas dilihat oleh Rusia juga sebagai mekanisme untuk meningkatkan pengaruhnya di Asia Tengah dan sebagai sarana untuk meningkatkan ketahanan energi Rusia. Kepentingan ekonomi Rusia pada sektor minyak dan gas ini didorong oleh modernisasi yang dilakukan pada sektor minyak dan gas dalam negeri Rusia, untuk itu dibutuhkan cadangan energi dari Asia Tengah untuk memenuhi kewajiban Rusia sebagai eksportir sumber daya minyak dan gas di dunia. Rusia sendiri sebenarnya memiliki cadangan minyak yang besar namun dengan kendala lokasi yang jauh menjadikan ladang minyak ini memiliki keuntungan yang lebih sedikit jika dibandingkan dengan eksploitasi ladang minyak di Asia Tengah.

Pada dua tahun pertama kepemimpinan Vladimir Putin sebenarnya belum ada kenaikan yang signifikan terjadi terkait hubungan perdagangan antara Rusia dan Asia Tengah. Kenaikan baru terjadi sejak tahun 2003, pada rentang waktu

antara 2003-2007 tingkat perdagangan tahunan naik ke angka 10,7 Miliar Dolar, 83% lebih tinggi jika dibandingkan dengan periode 1996-1999 dan 57% lebih tinggi dari periode 1992-1995. Lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.3 Perdagangan antara Rusia dan Asia Tengah, 2000-2007

Year	Volume of trade, millions of US dollars	Russian exports to Central Asia, millions of US dollars	Russian imports from Central Asia, millions of US dollars	Russian trade balance, millions of US dollars
2000	6469	2730	3739	-1009
2001	5924	3517	2407	1110
2002	5464	3492	1972	1520
2003	7088	4520	2568	1952
2004	10463	6103	4360	1743
2005	13227	7525	5702	1823
2006	14869	7982	6887	1095
2007	21787	13489	8298	5191

Sumber : Jurnal *The Evolution of Russia's Central Asia Policy*, hal 15

Meskipun ada indikasi kenaikan dalam tabel tersebut, saham yang dimiliki oleh negara Asia Tengah dalam perdagangan internasional Rusia masih sangat rendah bahkan turun pada periode 2003-2007 ini dari 3,96% menjadi 3,76%. Dan kebanyakan perdagangan antara Rusia dan Asia Tengah ini di dominasi sektor minyak dan gas dengan angka mencapai 36%. Namun secara keseluruhan pada era Vladimir Putin (2000-2008) ini perkembangan kegiatan ekonomi Rusia cenderung positif. Meskipun belum bisa dikatakan sukses besar dalam kebijakan ekonominya di Asia Tengah baik dalam kerangka CIS maupun tidak Rusia berhasil menguatkan posisinya dan secara umum berhasil mengatasi kurangnya kepercayaan terhadap Rusia yang tercipta pada tahun 1990an. Rusia era Vladimir Putin membawa fleksibilitas, pragmatisme, stabilitas dan konsistensi terhadap kebijakan di Asia Tengah. Hal ini memperbesar kemungkinan bagi Rusia untuk melebarkan kerja

samanya dibidang ekonomi di Asia Tengah di masa mendatang (Vladimir Paramonov & Aleksey Stokov, 2008).

Secara keseluruhan kepentingan ekonomi Rusia di wilayah Asia Tengah ini sebagian besar didorong oleh potensi sektor minyak dan gas yang melimpah di wilayah ini. Ambisi Rusia untuk menjadi kekuatan besar dalam ekonomi global menjadikan Vladimir Putin secara intensif bergerak cepat dalam menjalin kerja sama ekonomi dengan negara-negara Asia Tengah baik dalam kerangka kerja sama yang sudah ada yaitu CIS ataupun diluar kerangka tersebut.